

Judul : Harga Tes Turun Bukanlah Solusi
Tanggal : Minggu, 31 Oktober 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Kualitas PCR Berkurang Harga Tes Turun Bukanlah Solusi

ANGGOTA Komisi V DPR Sigit Sosiantomo meminta pemerintah membatalkan Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021 yang mewajibkan hasil tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) sebagai syarat penerbangan domestik. Syarat itu memberatkan masyarakat.

Sigit bilang, banyak aspek atau alasan yang membuat ketentuan itu tidak diberlakukan. Misalnya, di Jawa sudah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Namun, Jawa masih saja diwajibkan PCR. Jadi untuk apa kriteria level tersebut?

"Mestinya, saat PPKM level 1 kita cukup pakai antigen, bahkan tidak pakai tes Covid-19 lagi. Sebab, 60 persen warga Indonesia sudah divaksinasi?" kata Sigit melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Sigit menguraikan, kewajiban tes PCR akan menyusahkan masyarakat. Ketersediaan alat tes PCR juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, masa berlaku yang terlalu singkat dan harganya relatif mahal. Terlebih, aturan dalam Surat Edaran itu akan diterapkan ke seluruh moda transportasi.

Alasan utama pemerintah mensyaratkan hasil tes PCR untuk penerbangan domestik, lanjut dia, terkait rencana peningkatan kapasitas pesawat. Padahal, penelitian *International Air Transport Association* (IATA) mengungkap-

kan, transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi yang paling aman dari penyebaran Covid-19.

"Untuk menjaga penyebaran Covid-19 memperbanyak vaksin, bukan tes PCR. Itu sudah standar WHO. Bahkan, WHO saja hanya mensyaratkan antigen kalau sudah vaksin dua kali. Kita mau ikut standar yang mana? SE itu rujukannya apa?" tanyanya.

Senada, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan, kebijakan penurunan harga tes PCR, bukan solusi untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Kebijakan penurunan tarif dinilai berisiko menurunkan kualitas tes PCR dan menghambat upaya pemerintah memerangi penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

"Ketika ada kebijakan *pricing* (harga), itu bukan solusi. Nggak menyelesaikan masalah. Jangan sampai kualitas PCR, nggak berkualitas, nggak bagus," ujar Kurniasih.

Karenanya, dia mendorong pemerintah tidak memaksakan kebijakan tes PCR bagi penumpang pesawat udara. Pemerintah bisa mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memantau mobilitas masyarakat sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial.

"Kita kan sudah punya sistem PeduliLindungi, sudah pada vaksin. Optimalkan saja. Jangan menyulitkan rakyatlah," tegas dia. ■ ONI